

BAB II

DIMENSI PEMBANGUNAN EKOREGION







DIMENSI PEMBANGUNAN EKOREGION

Bab ini menyoroti konsep pembangunan pertanian berkelanjutan dalam suatu wilayah ekoregion yang terdiri dari tiga pilar, yaitu: ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumberdaya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Pembangunan pertanian berkelanjutan terkait dengan upaya konservasi lahan, air, sumberdaya genetik tanaman maupun hewan, tidak merusak lingkungan, tepat guna secara teknis, layak secara ekonomis, dan diterima secara sosial.

Dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air seringkali terjadi hubungan yang bersifat paradoks, khususnya pilihan antara pertimbangan ekologi dan ekonomi. Misalnya meski menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan, namun pengembangan lahan gambut untuk pertanian khususnya perkebunan sulit dibendung terutama di daerah dengan luasan gambut yang dominan. Hal ini disebabkan ada keuntungan ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usahatani. Demikian pula alih fungsi lahan pertanian seperti lahan sawah menjadi lahan pemukiman atau industry, meski berdampak terhadap penurunan multifungsi lahan pertanian termasuk fungsi pemeliharaan lingkungan, namun dari segi keuntungan ekonomi dianggap lebih menjanjikan. Oleh karena itu suatu analisis *tradeoff* perlu dilakukan, yakni dalam situasi seperti apa pertimbangan ekonomi menjadi prioritas, yaitu jika dampak negatif terhadap lingkungan atau sumberdaya manusia dapat ditekan sekecil mungkin. Namun jika dampak negatif terhadap pilar ekologi sulit untuk dikendalikan, maka pertimbangan ekonomi sebaiknya tidak menjadi prioritas.

Pemanfaatan lahan marginal yang tidak sesuai dengan kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan dapat mempercepat proses degradasi. Oleh karena itu pemanfaatan lahan gambut yang sedang berlangsung dewasa ini perlu di-reevaluasi dengan membangun kriteria yang memadai dilihat dari tiga pilar keberlanjutan. Demikian pula mengingat keterbatasan sumberdaya lahan yang tersedia maka pilihan pemanfaatan lahan yang pada umumnya bersumber dari lahan hutan perlu mempertimbangkan konteks lahan hutan yang dibangun.

Pengelolaan sumber daya lahan dan air yang dilakukan berdasarkan ekoregion, harus memperhatikan interkoneksi antara hulu dan hilir, interaksi air tanah dan air permukaan, serta interkoneksi keragaman hayati. Semua tindakan pengelolaan lahan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang dapat berproduksi secara berkelanjutan. Pembangunan pertanian kedepan harus seiring dengan perwujudan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai dengan UU Nomor 32/2009 yang memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, serta mempunyai empat muatan, yaitu (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam, dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Dalam suatu wilayah ekoregion pertanian, yang paling rentan terhadap perubahan iklim adalah tanaman pangan. Resiko pertanian akibat perubahan iklim yang paling sering terjadi adalah akibat adanya iklim ekstrim dan perubahan pola distribusi curah hujan. Salah satu fenomena meteorologis yang sering melanda Indonesia adalah El Nino dan La Nina. Keduanya merupakan sepasang fenomena yang terjadi beriringan, sebagai bentuk dari kesetimbangan neraca air di atmosfer.



Berdasarkan analisis dan kesepakatan para ahli terhadap 8 faktor yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) UU No 32/2009, proses penetapan ekoregion darat menggunakan parameter deliniator bentang alam, yaitu morfologi (bentuk muka bumi) dan morfogenesis (asal usul pembentukan bumi). Metode penetapan ini dapat diekspresikan pada satuan unit tanah atau satuan unit lahan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian secara operasional telah menyusun data-data spasial untuk jenis tanah, dan juga konsep pertanian ramah lingkungan, kesesuaian bagi tanaman tertentu dalam bentuk peta-peta Agroekologi Zone (AEZ). Beberapa contohnya seperti peta kesesuaian untuk padi, jagung, dan kedelai skala 1:1.000.000 seluruh Indonesia, peta kesesuaian tanaman tebu, coklat, jarak pagar dan sebagainya. Akan tetapi peta-peta AEZ tersebut masih didominasi oleh pertimbangan keragaman tanah, belum banyak memperhitungkan keragaman, variabilitas dan dinamika iklim.

Tantangan pembangunan pertanian berbasis ekoregion masa depan adalah merancang pertanian yang dapat menyesuaikan dan merespon perubahan iklim, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertanian ekoregion berbasis sumberdaya iklim perlu melihat dan mengembangkan kembali kearifan lokal yang ramah lingkungan yang telah terbukti lebih tahan terhadap deraan iklim. Praktik-praktik yang meningkatkan keragaman hayati pertanian memungkinkan untuk meniru proses-proses ekologi alami, sehingga memungkinkan mereka menanggapi perubahan dan mengurangi risiko dengan lebih baik.

Pengembangan kawasan termasuk pembangunan ekoregion akan memberikan hasil perbaikan perekonomian yang optimal, apabila terdapat kesesuaian dalam proses interaksi yang efektif antar komponen wilayah, misalnya antara kota (pusat konsumsi) dan pedesaan (pusat produksi). Hal tersebut perlu dijadikan dasar pertimbangan pengembangan wilayah ekoregion secara terpadu, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan berorientasi kepada produksi, yang diarahkan pada penciptaan keterkaitan antara proses produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagai satu kesatuan sistem.